

Pengaruh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015

(*Determination of IPM, GRDP, UMP, and Inflation on Employment Opportunities in Java Island Period 2006 -2015*)

Agam Nurhardiansyah, Nanik Istiyani¹, Fajar Wahyu P.
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

¹E-mail: istiyani_nanik@yahoo.com

Abstrak

Pulau Jawa tidak terlepas dari masalah sosial berupa terbatasnya kesempatan kerja bagi jumlah angkatan kerja yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh IPM, PDRB, UMP dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data berupa *time series* (tahun 2006 - 2015) dan *cross section* (enam provinsi di Pulau Jawa) atau disebut dengan analisis regresi data panel dengan pemilihan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Pulau Jawa dipengaruhi sebesar 99,6% oleh IPM, PDRB, UMP dan inflasi sedangkan 0,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dimana IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,0038 dan 0,0104; UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0221; dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa dengan nilai signifikansi sebesar 0,5425.

Kata kunci: IPM, PDRB, UMP, Inflasi, Kesempatan Kerja, Data Panel.

Abstract

Java is inseparable from social problems in the form of limited employment opportunities for the number of available labor force. This study aims to determine and analyze the impact of HDI, GRDP, Provincial Minimum, and inflation on employment opportunities in Java. Data analysis method used is quantitative method using time series data (2006 - 2015) and cross section (six provinces in Java) or called panel data regression analysis with best model of Fixed Effect Model (FEM). The results showed that employment in Java affected 99.6% by HDI, PDRB, UMP and inflation while the remaining 0.4% was influenced by other factors, where HDI and GRDP had a positive and significant effect on poverty with their respective significance value - in the amount of 0.0038 and 0.0104; UMP has a negative and significant effect on poverty with a significance value of 0.0221; And inflation has no significant effect on employment in Java with a significance value of 0.5425.

Keywords: HDI, GRDP, Provincial Minimum Wages, Inflation, Employment Opportunities, Panel Data.

Pendahuluan

Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat demi tercapainya peningkatan kesejahteraan penduduk (Kuncoro, 1997:37). Untuk mencapai tujuan ini salah satunya harus tersedia lapangan pekerjaan bagi semua penduduk khususnya angkatan kerja. Kesempatan kerja yang tersedia harus berkualitas, artinya mampu memberikan pendapatan yang menjamin kehidupan para pekerja dan anggota keluarganya secara layak.

Terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa menjadi penyebab timbulnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia ini mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Daerah-daerah lain di Indonesia kekurangan penduduk

sementara di Pulau Jawa terjadi kepadatan penduduk. Masalah ketenagakerjaan di negara berkembang khususnya di Pulau Jawa yang memiliki banyak penduduk sangat besar dan kompleks. Kompleks diakibatkan masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Persoalan muncul karena pertumbuhan laju penduduk dan angkatan kerja yang cepat akibat kurang diimbangnya penyediaan lapangan kerja. Mutu dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah berakibat rendahnya juga tingkat penghasilan. Akibat dari masalah kesempatan kerja tersebut akan menimbulkan dampak berupa meningkatnya jumlah pengangguran yang berujung pada berbagai persoalan ekonomi dan sosial.

Timbul sebuah problematika di mana ketika pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 – 2015

justru berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Pulau Jawa yang mengalami penurunan jumlah kesempatan kerja pada tahun 2015. Selain itu, Pulau Jawa menyumbangkan lebih dari setengah total kesempatan kerja yang ada di Indonesia tetapi jumlah pengangguran yang ada juga turut memberi sumbangsih yang cukup besar yaitu 60 – 65% dari total keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia atau dengan kata lain tingkat presentase pengangguran yang terjadi melebihi persentase kesempatan kerja. Angka pengangguran yang terus meningkat harus dapat ditekan supaya tidak menjadi suatu pemborosan terhadap sumber daya manusia dan potensi yang ada. Salah satu cara yang harus dilakukan dalam mengurangi pengangguran yaitu dengan membuka lapangan kerja baru.

Penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin besar merupakan tantangan utama pembangunan dalam mengatasi pengangguran. Oleh karena, itu perlu lebih ditingkatkan langkah-langkah pembangunan yang menyeluruh dan terpadu bagi penciptaan lapangan kerja seluas mungkin, baik langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral, regional maupun khusus (Soetrisno, 1992:293). Langkah-langkah yang bersifat umum meliputi penentuan tingkat upah minimum, kebijakan fiskal dan moneter yang salah satunya berupa mengatur tingkat inflasi. Langkah selanjutnya yang bersifat sektoral meliputi kebijaksanaan pembangunan di sektor pertanian, industri, dan jasa yang berorientasi kepada perluasan tenaga kerja sebesar mungkin, sedangkan langkah-langkah yang bersifat regional meliputi upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kesempatan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan kualitas angkatan kerja yang tersedia, agar dapat lebih memanfaatkan seluruh seluruh potensi di masing-masing daerah. Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan padat karya dan lain-lain.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah *eksplanatory research* yaitu metode penelitian yang diasumsikan adanya hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) yang dipengaruhi (Herjanto, 2007:96). Penelitian ini menelaskan hubungan antara IPM, PDRB, UMP dan inflasi terhadap kesempatan kerja.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di semua provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi D.K.I Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten dengan periode waktu penelitian 2006 - 2015.

Data dan Prosedur Pengumpulan

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* dan *cross section* yang bersifat kuantitatif atau selama kurun waktu 2006 – 2015 (sepuluh tahun) dan enam wilayah penelitian. Sumber data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berdasarkan penelitian terdahulu.

Metode Analisis

Analisis Regresi Panel Data

Untuk menganalisis pengaruh IPM, PDRB, UMP, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa maka digunakan model regresi data panel. Ekananda (2015:369) menjelaskan di dalam ekonometrika, proses penyatuan data antar waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross section*) disebut dengan *pooling*. Sedangkan data yang dihasilkan disebut dengan *pooled data* atau *panel data*.

Adapun fungsi dari model ekonomi variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$KK = f (IPM, PDRB, UMP, INF)$$

Fungsi di atas kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika, sehingga menjadi:

$$KK = \alpha + b_1IPM_{i,t} + b_2PDRB_{i,t} + b_3UMP_{i,t} + b_4INF_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Dimana :

KK = Kesempatan kerja

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

UMP = Upah Minimum Provinsi

INF = Inflasi

α = Intersep

b_{it} = Koefisien variabel

e = *Error term*

i = 1, 2, ..., N (banyaknya sampel/observasi)

t = 1, 2, ..., T (banyaknya waktu)

Untuk menghindari perbedaan pengertian yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas maka digunakan batasan-batasan sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk di setiap provinsi Pulau Jawa yakni berupa tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak (dalam satuan indeks/tahun).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi semua sektor perekonomian di setiap provinsi di Pulau Jawa dengan melihat nilai tambah bruto yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 (dalam satuan miliar/tahun).

3. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh masing-masing gubernur yang berlaku untuk setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa (dalam satuan rupiah/tahun).

4. Inflasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di setiap provinsi Pulau Jawa (dalam satuan persen/tahun).

5. Kesempatan kerja

Jumlah penduduk usia angkatan kerja yang sudah bekerja di setiap provinsi Pulau Jawa. Untuk mengetahui jumlah kesempatan kerja yaitu dengan cara mengurangi jumlah penduduk angkatan kerja dengan pengangguran (dalam satuan jiwa/tahun).

Hasil Penelitian

Berdasarkan Pembahasan ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya. Secara rinci akan diuraikan dalam beberapa bagian dengan tata urutan secara kronologis meliputi pembahasan pengaruh faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan inflasi terhadap kesempatan kerja. Selanjutnya akan diuraikan perpaduan antara temuan empiris hasil penelitian yang telah diuji secara statistik dengan teori dan penelitian sebelumnya sehingga diperoleh suatu konsep pengembangan teori.

4.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kesempatan Kerja di Setiap Provinsi Pulau Jawa

Hasil estimasi persamaan regresi *panel data* selama tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap Provinsi Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi 224.356,5 dan probabilitas t statistik 0,0038 memiliki arti setiap penambahan 1% variabel IPM akan meningkatkan kesempatan kerja di Pulau Jawa sebesar 224.357 jiwa. Terdapat tiga indikator IPM yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Menurut Idris (2016:30) penerapan dari pendekatan teori *human capital* adalah pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena tidak saja menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan pendidikan dengan produktivitas kerja dapat tercermin dalam tingkat penghasilan.

Faktor kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sehingga peningkatan di bidang kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah. Rendahnya tingkat kesehatan disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan yang tercermin dalam tingkat upah dan pengeluaran rumah tangga yang rendah. Dengan adanya perbaikan tingkat hidup juga dapat menghasilkan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas ini akan ikut menunjang pada peningkatan produktivitas yang akan meningkatkan pendapatan dan tingkat kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tingginya IPM mempengaruhi tenaga kerja dalam memperoleh sebuah pekerjaan. Apabila nilai IPM di suatu daerah rendah maka akan sulit dalam mencari pekerjaan, rendahnya IPM menyangkut dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran akibat dari minimnya kesempatan kerja.

4.3.2 Pengaruh Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) terhadap Kesempatan Kerja di Setiap Provinsi Pulau Jawa

Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap Provinsi Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar 8,303504 dan probabilitas t statistik 0,0104 yang berarti setiap penambahan 1.000 Milyar variabel PDRB maka akan meningkatkan kesempatan kerja di Pulau Jawa sebesar 8.303 jiwa. Hal ini serupa dengan penelitian oleh Ringo (2007) yang menyatakan bahwa variabel PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja pada sektor industri skala menengah dan besar di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap kesempatan kerja.

Menurut teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*), setiap wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun sektor yang memiliki keunggulan (*competitive advantage*) untuk dikembangkan. Perkembangan sektor yang telah ada akan membantu mendorong sektor lain untuk berkembang sehingga perekonomian akan terus mengalami pertumbuhan (Tarigan, 2009:54). Dikutip dari Badan Pusat Statistik (2016), pada tahun 2011-2015, pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan yang baik setiap tahunnya, di mana penyumbang PDRB tertinggi di setiap provinsi Pulau Jawa yaitu sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah PDRB tertinggi disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sedangkan lima provinsi lainnya mempunyai sektor unggulan yang sama, yaitu industri pengolahan. Di DKI Jakarta, sektor industri

pengolahan hanyalah penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor konstruksi di urutan kedua.

Sektor Industri di Pulau Jawa merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor industri pada umumnya di negara sedang berkembang merupakan padat karya yang membutuhkan faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran khususnya di Pulau Jawa.

Peningkatan nilai PDRB menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi. Sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah. Itu sebabnya, setiap provinsi di Pulau Jawa harus memperhatikan sektor dan sub sektor unggulan untuk selalu dikembangkan, selain itu sektor dan sub sektor yang kurang berperan agar dapat ditingkatkan agar terjadi perputaran ekonomi dan mampu untuk membantu membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan berkualitas.

4.3.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kesempatan Kerja di Setiap Provinsi Pulau Jawa

Hasil estimasi persamaan regresi *panel data* selama tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap Provinsi Pulau Jawa. Nilai koefisien sebesar 0,816861 dan probabilitas t statistik 0,0221 yang berarti setiap penambahan Rp 100.000 variabel UMP maka akan mengurangi kesempatan kerja di Pulau Jawa sebesar 81.686 jiwa. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kalangan ahli dari mazhab klasik yaitu Malthus dan John Stuart Mills yang mempunyai kesan pesimisme terhadap tingkat upah yang hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Malthus berpendapat bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah tetapi dengan berkurangnya jumlah penduduk justru akan mengangkat tingkat upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula. Sama halnya dengan John Stuart Mills yang menyebutkan pada saat investasi sudah dilakukan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi, tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut (Arfida, 2003:150).

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Paul Hutagalung dan Santosa (2013) juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini.

Berdasarkan uji t parsial, variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05 dengan t hitung sebesar 4,637 dan artinya jika upah minimum naik maka kesempatan kerja di kabupaten/kota di Jawa Tengah juga turut meningkat.

Kenaikan upah minimum akan berdampak positif bagi pekerja, karena tingkat upah yang diterima dapat membuat kualitas hidup yang layak bagi pekerja, bahkan mampu menabung (*saving*) untuk kebutuhan lain di masa yang akan datang, tetapi peningkatan upah minimum yang terlalu tinggi juga akan mendorong perusahaan untuk melakukan hal sebagai berikut.

A. Mengurangi Penggunaan Tenaga Kerja dengan Menurunkan Produksi

Peningkatan upah minimum merupakan bencana bagi sebagian besar perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar pekerjanya sesuai dengan tingkat upah yang berlaku atau dengan kata lain perusahaan mengalami defisit, maka secara otomatis akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna menutupi pembayaran upah. Perusahaan sebisa mungkin harus menentukan strategi yang tepat agar bisa melakukan efisiensi biaya, bahan baku, tenaga dan lainnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan neraca keuangan yaitu dengan menurunkan produksi dan otomatis menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit.

B. Menggunakan Teknologi yang Lebih Padat Modal

Pilihan terhadap teknologi padat modal dianggap sebagai alternatif yang tepat bagi perusahaan dalam menghadapi upah minimum yang meningkat setiap tahunnya. Pemilihan ini dilandaskan pada keinginan mencapai tingkat produksi yang maksimal dengan biaya produksi per-unit yang rendah. Hal tersebut tidak akan bisa didapatkan perusahaan apabila tetap menggunakan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Dengan mengalihkan fungsi tenaga kerja pada teknologi padat modal, perusahaan akan terbebas dari pembayaran upah yang setiap tahunnya semakin membengkak, di sisi lain dengan pengalihan fungsi ini akan menimbulkan tingkat pengangguran semakin meningkat.

4.3.4 Pengaruh Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Setiap Provinsi Pulau Jawa

Hasil estimasi persamaan regresi *panel data* selama tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap Provinsi Pulau Jawa dengan nilai probabilitas t statistik 0,5425. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Phillips yang menemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran, dalam arti apabila tingkat inflasi naik maka pengangguran turun, sebaliknya apabila inflasi turun maka pengangguran naik (Putong, 2003:507). Jika dikaitkan

dengan kesempatan kerja, penelitian kurva Phillips beranggapan apabila tingkat inflasi naik maka kesempatan kerja naik, sebaliknya apabila inflasi turun maka jumlah kesempatan kerja akan mengalami penurunan. Hasil penelitian sebelumnya oleh Hutagalung dan Santosa (2013) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara tingkat inflasi dengan kesempatan kerja di suatu wilayah.

Inflasi di Pulau Jawa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kesempatan kerja, hal ini disebabkan oleh inflasi yang terjadi berasal dari sisi penawaran. Inflasi penawaran adalah kenaikan inflasi karena meningkatnya biaya input (*cost push inflation*). Selain karena kenaikan biaya, inflasi penawaran juga dapat disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah terhadap harga (*administered prices*) dan *supply shock*. Kenaikan harga dari sisi biaya merupakan faktor penting yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi sisi penawaran adalah kebijakan yang diambil oleh instansi lain di luar Bank Indonesia, misalnya, kebijakan penghapusan subsidi pemerintah atau kebijakan kenaikan pajak yang mengakibatkan meningkatnya harga barang tersebut (*administered prices*). Misalnya kenaikan inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2008 (dan juga pada 2013) terutama terkait dengan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran (*supply shock*) misalnya apabila terjadi musim kering yang mengakibatkan gagal panen, terjadinya bencana alam dan gangguan distribusi sehingga distribusi tidak lancar. Gangguan tersebut akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga barang-barang tersebut secara umum dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi (Suseno dan Astiyah, 2009:41). Dengan alasan tersebut, maka tidaklah tepat apabila perubahan jumlah kesempatan kerja yang terjadi di Pulau Jawa dihubungkan dengan tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan inflasi di Pulau Jawa diukur melalui tujuh belas sektor perekonomian dan bukan kenaikan permintaan akibat upah yang tinggi. Oleh karena itu penelitian A.W Phillips melalui kurva Phillips tidak tepat apabila diterapkan di Pulau Jawa dikarenakan kondisi inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi di daerah penelitian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari estimasi regresi *panel data* secara simultan/bersama-sama dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan inflasi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2006 – 2015.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2006 – 2015. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin tinggi jumlah kesempatan kerja.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2006 – 2015. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka semakin tinggi jumlah kesempatan kerja.
4. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2006 – 2015. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Upah Minimum Provinsi (UMP) maka semakin berkurang jumlah kesempatan kerja.

Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2006 – 2015. Hal ini berarti bahwa berapapun nilai dari inflasi meningkat, maka tidak akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Diharapkan pemerintah lebih fokus memperhatikan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama pada sektor industri pengolahan yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang tinggi, selain itu perhatian penuh juga dibutuhkan terhadap sektor-sektor non unggulan supaya menjadi lebih berkembang dari sebelumnya sehingga perekonomian akan terus mengalami pertumbuhan.
2. Melihat besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa, diharapkan pemerintah di setiap Provinsi Pulau Jawa lebih meningkatkan pengeluarannya baik untuk pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan pelayanan publik yang berhubungan dengan tiga indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.
3. Dalam menentukan seberapa besar Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah hendaknya menerapkan sesuai dengan proporsi dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak perusahaan maupun tenaga kerja dan diharapkan nantinya justru dengan kenaikan tingkat upah dapat menambah jumlah kesempatan kerja.

4. Dalam usaha peningkatan jumlah kesempatan kerja di Pulau Jawa hendaknya pemerintah mengabaikan pengaruh inflasi dikarenakan hal tersebut tidak memberikan dampak sama sekali terhadap penambahan atau pengurangan jumlah kesempatan kerja yang ada.

- Soetrisno, 1992. **Kapita Selekta Ekonomi Indonesia: Suatu Studi**. Yogyakarta: Andi Offset
- Suseno dan Siti Astiyah. 2009. **Inflasi**. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI
- Tarigan, Robinson. 2009. **Ekonomi Regional**. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “*Pengaruh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015*”. Penelitian ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ucapan terima kasih setulus – tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini. Atas segala bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Haroh Sri Nurjanah, Ayahanda Rudy Nurdianto, Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si, Bapak Fajar Wahyu P, SE. ME, Bapak Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes, Ibu Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si, dan ibu Aisah Jumiaty, S.E., M.P, serta rekan serta kerabat yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Terima kasih.

Referensi

- Arfida. 2003. **Ekonomi Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ekananda, Mahyus. 2015. **Ekonometrika Dasar**. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Herjanto, Eddy. 2007. **Manajemen Operasi Edisi Ketiga**. Jakarta: Grasindo
- Hutagalung, Paul dan Purbayu Budi Santosa. 2013. Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa Tengah (35 Kab/Kota). *Diponegoro Journal of Economics*. 2(4): 1-12
- Idris, Amiruddin. 2016. **Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta: Deepublish
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Putong, Iskandar. 2007. **Economics Pengantar Mikro dan Makro**. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ringo, Rimmar Siringo. 2008. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Industri Menengah dan Besar di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara